

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat menaruh kepercayaan kepada pemerintah daerah sebagai pihak yang menjalankan roda pemerintahan. Oleh karena itu, sudah seharusnya kepercayaan ini dijaga dengan memberikan pelayanan yang baik dan hasil kerja yang nyata. Pemerintah perlu menunjukkan kinerja yang kuat dan bertanggung jawab, agar kepercayaan yang diberikan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat sehari-hari. Masih banyak masyarakat yang belum benar-benar merasakan dampak nyata dari kinerja pemerintah. Meski berbagai program dan kebijakan telah dijalankan, harapan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan merata sering kali belum sepenuhnya terpenuhi, ada banyak asumsi yang berbeda tentang pelaksanaan otonomi daerah (Pattiware & Maryam, 2024). Akibatnya, kinerja pemerintah menjadi salah satu masalah yang paling disoroti masyarakat. Sebagai bagian dari sektor publik, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk bekerja sebaik mungkin dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kinerja yang baik bukan hanya soal memenuhi kewajiban, tapi juga tentang memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang mereka layani

Kinerja instansi pemerintah berperan penting dalam menilai sejauh mana efektivitas dan efisiensi suatu pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Instansi pemerintah bertanggung jawab untuk menjalankan berbagai

kebijakan dan program agar dapat diimplementasikan secara optimal. Kinerja yang baik menunjukkan bahwa pemerintah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kualitas layanan publik (M. M. Febrianti & Priyadi, 2022). Evaluasi terhadap kinerja instansi pemerintah menjadi hal yang esensial dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif.

Kinerja yang optimal tidak hanya menggambarkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga mencerminkan seberapa baik suatu daerah mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya demi kesejahteraan masyarakat. Setiap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah harus berorientasi pada kepentingan publik, sehingga efektivitas dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia menjadi faktor penentu utama (Lathifah et al., 2024). Jika instansi pemerintah dapat bekerja dengan baik, maka pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

Kinerja instansi pemerintah merupakan aspek mendasar dalam menentukan efektivitas penyelenggaraan administrasi publik di berbagai negara. Instansi yang berkinerja baik mampu memberikan layanan publik yang berkualitas, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan yang tepat sasaran. Secara global, negara-negara maju seperti Denmark, Singapura, dan Kanada telah berhasil menerapkan sistem administrasi yang *modern* dengan mengoptimalkan digitalisasi layanan publik, efisiensi administrasi, serta sistem pengawasan yang ketat (Zein, 2023). Penerapan *e-Government* dan tata kelola berbasis data menjadi instrumen utama dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, yang memungkinkan

integrasi data antarinstansi untuk mempercepat proses pengambilan keputusan. Dengan sistem digital yang terintegrasi, berbagai layanan publik, seperti perizinan, administrasi kependudukan, dan pengelolaan anggaran, dapat dilakukan secara lebih efisien dan minim penyimpangan.

Efektivitas instansi pemerintah di negara-negara tersebut juga didukung oleh kebijakan yang berorientasi pada pencapaian kinerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta pengelolaan anggaran yang efisien (Prastyo, 2024). Pegawai pemerintah diberikan pelatihan berkala untuk meningkatkan kompetensi, sementara evaluasi kinerja dilakukan secara transparan untuk memastikan bahwa setiap pegawai memiliki kontribusi optimal terhadap tujuan organisasi. Selain itu, kebijakan tata kelola keuangan berbasis kinerja memungkinkan anggaran dialokasikan dengan lebih efisien, sehingga setiap program pemerintah memiliki sasaran yang jelas dan dapat diukur. Pemerintahan yang efisien bergantung pada kejelasan perencanaan strategis, optimalisasi sistem administrasi berbasis teknologi, serta penerapan sistem evaluasi yang ketat. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dapat menjadikan praktik ini sebagai referensi dalam memperbaiki sistem administrasi publik guna meningkatkan daya saing dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan pemerintahan daerah di Indonesia berpedoman pada regulasi yang mengatur tata kelola pemerintahan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik sebagaimana diuraikan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014) yang menegaskan bahwa sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk

menerapkan nilai-nilai akuntabilitas, keterbukaan, dan partisipasi dalam setiap kebijakan yang dibuat. Prinsip transparansi dalam pemerintahan menekankan keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait kebijakan serta pengelolaan anggaran daerah. Prinsip akuntabilitas juga mengharuskan instansi pemerintah mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan program yang dijalankan, baik dalam aspek keuangan, pelaksanaan program, maupun hasil yang dicapai.

Jawa Timur, sebagai salah satu provinsi besar di Indonesia, masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja lembaga-lembaga pemerintahnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengimplementasikan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki tata kelola administrasi, seperti penguatan sistem pengendalian internal, optimalisasi anggaran berbasis kinerja, serta mengatur beban pekerjaan yang efektif (Oktavianto, 2023). Meskipun demikian, beberapa kendala masih terjadi, seperti kurangnya integrasi sistem administrasi berbasis teknologi, belum optimalnya pengawasan internal, serta distribusi pegawai yang tidak merata. Beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur masih menghadapi kendala dalam menyesuaikan kebijakan daerah dengan standar nasional, yang berdampak pada keterlambatan dalam implementasi program kerja. Diperlukan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat, serta penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan berbasis kompetensi guna meningkatkan efektivitas birokrasi di Jawa Timur.

Partisipasi masyarakat juga menjadi elemen penting dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Masyarakat harus diberikan ruang untuk berkontribusi dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan, sehingga kebijakan yang diambil benar-

benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemerintah yang mampu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan lebih efektif dalam menjalankan program-programnya karena memiliki dukungan dan legitimasi yang kuat.

Dalam era *modern* yang semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah, khususnya kota Surabaya sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, masih menghadapi berbagai tantangan dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintahnya (Samudera & Pertiwi, 2022). Menghadapi tantangan dalam memastikan kinerja instansi pemerintahnya berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Berbagai peristiwa yang terjadi menunjukkan bahwa sistem administrasi dan pengelolaan anggaran pemerintah daerah masih memerlukan perbaikan agar dapat memberikan pelayanan publik yang optimal.

Tidak seluruh lapisan masyarakat terdampak secara langsung oleh kebijakan pembangunan yang kurang konsisten tersebut. Karena perhatian yang kurang pada daerah pinggiran, pembangunan di pusat kota cenderung difokuskan pada aspek estetika semata. Masyarakat juga mengkritisi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) yang dinilai belum mampu menjalankan perencanaan pembangunan secara merata di se luruh wilayah. Kondisi ini menjadi tidak proporsional apabila dibandingkan dengan besaran anggaran yang dimiliki pemerintah kota untuk mendukung pembangunan di setiap wilayah di Surabaya (Manna, 2022). Fenomena tersebut merupakan hasil dari jaring aspirasi (reses) anggota DPRD Surabaya yang menyampaikan keluhan mengenai

ketidakpedulian Pemerintah Kota Surabaya terhadap kondisi infrastruktur dan fasilitas di wilayah pinggiran (*Dinas Kominfo, 2024*)

Masalah kemacetan yang semakin parah di Surabaya, bahkan melebihi Jakarta, sebagaimana diberitakan oleh Dinas Perhubungan Surabaya (*KOMPAS.Com, 2025*) mencerminkan kompleksitas tantangan dalam manajemen tata kota dan kinerja instansi pemerintah daerah. Kondisi ini dapat diinterpretasikan sebagai salah satu indikator kinerja yang memerlukan perhatian khusus. Kejelasan sasaran anggaran menjadi krusial dalam memastikan alokasi dana yang efektif untuk peningkatan infrastruktur dan pengaturan lalu lintas. Kerangka kerja pengendalian internal yang kuat diperlukan untuk meminimalisasi risiko penyimpangan dalam pelaksanaan program-program transportasi publik dan pengendalian lalu lintas. Beban kerja yang seimbang bagi pegawai dinas terkait juga menjadi faktor penting agar pelaksanaan tugas dan pengawasan di lapangan dapat berjalan optimal.

Penilaian terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilakukan untuk mengukur sejauh mana instansi pemerintah telah menerapkan SAKIP serta mendorong peningkatan tanggung jawab kinerja menuju pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Grafik berikut menggambarkan perkembangan hasil evaluasi SAKIP di Kota Surabaya dari tahun 2019:

Tabel 1.1 Hasil Evaluasi SAKIP Kota Surabaya

Tahun	Angka	Predikat
2019	73.47	BB
2020	75.13	BB
2021	75.34	BB
2022	80.31	A
2023	83.92	A

Sumber : <https://ro-organisasi.jatimprov.go.id/>

Kemajuan yang signifikan telah dicapai, khususnya di Kota Surabaya, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 1.1 yang mencerminkan peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 hanya mendapatkan angka 73.47 untuk Laporan Hasil Evaluasinya (LHE), meningkat menjadi 83.92 pada tahun 2023. Capaian kinerja tersebut sejalan dengan prestasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang secara konsisten menunjukkan komitmennya dalam menerapkan sistem ini, sehingga menjadi salah satu daerah yang patut dibanggakan dalam hal implementasi SAKIP.

Meskipun Kota Surabaya telah mendapatkan nilai SAKIP dengan predika yang cukup baik Komisi Pelayanan Publik (KPP) masih menerima sejumlah keluhan dari masyarakat yang menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap kinerja Pemerintah Kota Surabaya. Keluhan masyarakat terus bermunculan, terutama terkait hak-hak pelayanan yang belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satu contohnya adalah permasalahan yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang dilaporkan melakukan kesalahan dalam penanganan administrasi kependudukan serta mengalami kekurangan (*KOMPAS.Com*, 2024). Fakta tersebut menunjukkan bahwa layanan publik di Kota Metropolitan Surabaya masih

menghadapi tantangan reputasi di mata masyarakat. Meskipun Surabaya telah meraih berbagai penghargaan dan diposisikan sebagai kota kontemporer berkelas dunia, upaya peningkatan dalam manajemen pelayanan publik masih diperlukan (Pratiwi & Meirinawati, 2023).

Kejelasan sasaran anggaran merupakan elemen penting dalam manajemen keuangan publik, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah (Fadillah, 2024). Tanpa kejelasan sasaran anggaran, alokasi dana bisa saja tidak tepat sasaran, yang akhirnya berdampak pada terhambatnya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dalam praktiknya, anggaran yang dialokasikan harus sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan, baik dalam hal prioritas maupun penggunaan dana. Hal ini penting agar setiap sektor dan program mendapatkan bagian yang cukup untuk mencapai target yang diinginkan, serta memastikan tidak ada sektor yang terabaikan.

Di tingkat pemerintahan daerah, khususnya di Kota Surabaya, pentingnya kejelasan sasaran anggaran semakin terasa ketika anggaran publik digunakan untuk berbagai program strategis yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat (Sahara et al., 2024). Program-program tersebut, seperti pelayanan, pengembangan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program kesejahteraan lainnya, memerlukan pengelolaan yang transparan dan rasional agar setiap program dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Jika anggaran tidak dialokasikan dengan jelas dan tepat, program-program yang telah direncanakan sebelumnya berpotensi mengalami hambatan atau bahkan kegagalan. Hal ini tidak hanya menghambat

pencapaian tujuan, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kondisi pengelolaan anggaran di Kota Surabaya menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa alokasi dana dapat mendukung berbagai program strategis secara optimal. Situasi ini menunjukkan adanya permasalahan dalam kejelasan sasaran anggaran, di mana perencanaan dan alokasi dana untuk kebutuhan administratif tidak dikelola secara optimal dan mengakibatkan banyak rumah sakit kesulitan dalam operasionalnya. Jika anggaran tidak dialokasikan dengan tepat, maka program pelayanan publik yang penting bagi masyarakat akan mengalami hambatan serius.

Keputusan dalam pengalokasian anggaran sering kali menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, terutama ketika harus menyeimbangkan antara kebutuhan administrasi, pelayanan kesehatan, dan sektor publik lainnya. Ketidakjelasan dalam perencanaan anggaran dapat menyebabkan keterlambatan atau bahkan penghentian program-program penting yang sudah dirancang sebelumnya. Keterlambatan pencairan dana untuk pembayaran klaim BPJS menyebabkan rumah sakit mengalami kesulitan dalam pembelian obat dan pembayaran tenaga medis, yang pada akhirnya berdampak pada pelayanan pasien. Begitu pula dengan distribusi blangko *e-KTP* yang tidak optimal, yang membuat masyarakat kesulitan mengakses dokumen resmi yang dibutuhkan untuk pendidikan, pekerjaan, dan berbagai keperluan lainnya.

Menurut (Kewo, 2024) dalam teori anggaran publik, salah satu faktor yang berpengaruh besar terhadap efektivitas pelaksanaan tugas lembaga pemerintah adalah kejelasan target anggaran yang ditetapkan. Adanya perencanaan yang matang dan pemahaman yang jelas tentang prioritas anggaran, instansi pemerintah dapat mengelola anggaran dengan lebih efisien dan efektif. Sebaliknya, jika anggaran dialokasikan tanpa perencanaan yang matang atau prioritas yang jelas, hal ini dapat menyebabkan pemborosan, penundaan program, maupun ketidakjelasan dalam penetapan target anggaran dapat menyebabkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara lebih rinci bagaimana kejelasan target anggaran berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah di Kota Surabaya, dengan fokus pada dampaknya terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program-program pemerintah.

Sistem pengendalian internal memegang peran penting dalam memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara tepat sasaran dan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sistem pengendalian internal bukan hanya sekadar serangkaian kebijakan dan prosedur, tetapi merupakan fondasi yang mendasari pengelolaan keuangan yang terbuka dan bertanggung jawab di tingkat pemerintahan (Setiawan & Johannes, 2024). Pengendalian internal ini melibatkan pengawasan yang cermat terhadap penggunaan sumber daya, serta menjamin keakuratan dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan yang disajikan. Diharapkan, dengan adanya sistem pengendalian yang efisien, kegiatan operasional

instansi pemerintah dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, tanpa penyimpangan maupun pemborosan anggaran.

Selain berperan dalam memastikan efisiensi penggunaan anggaran, sistem pengendalian internal yang kuat juga memiliki peran krusial dalam mencegah terjadinya kesalahan maupun penyimpangan dalam pengelolaan keuangan, memperkuat transparansi, dan mengurangi potensi korupsi atau penyimpangan lainnya yang dapat merugikan kepentingan publik. Dalam pengelolaan anggaran publik, salah satu kesulitan signifikan yang dihadapi adalah bagaimana mengelola dana yang terbatas untuk mencakup berbagai kebutuhan yang sangat beragam (Firdaus et al., 2024). Oleh karena itu, keberadaan sistem pengendalian internal yang efektif menjadi sangat penting dalam mendukung agar anggaran tidak disalahgunakan dan digunakan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam situasi seperti ini, jika pengendalian internal tidak diterapkan dengan baik, ada risiko besar bahwa program-program lain yang lebih mendesak atau strategis tidak dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Penundaan proyek-proyek penting ini tidak hanya menghambat kemajuan infrastruktur, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola anggaran dan menjalankan program-program yang dijanjikan. Dengan kata lain, kegagalan dalam menjaga pengendalian internal yang baik dapat mengarah pada ketidakefisienan dan ketidakmampuan pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan daerah yang telah disepakati bersama.

Menurut (Standar Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia Berbasis Akrua, 2020) pengendalian internal yang kuat harus mencakup beberapa elemen penting, yaitu pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran, adanya pertanggungjawaban yang jelas atas setiap penggunaan dana, serta evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas dan efisiensi setiap program yang telah dijalankan. Pengawasan yang ketat akan memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran didokumentasikan dengan baik dan dilaporkan secara transparan, sehingga meminimalisir peluang terjadinya penyalahgunaan atau penggelapan dana. Evaluasi berkala juga merupakan bagian yang tidak kalah penting, karena hal ini memungkinkan instansi pemerintah untuk menilai apakah anggaran yang telah dikeluarkan memberikan dampak yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana sistem pengendalian internal yang ada di Surabaya memengaruhi kinerja instansi pemerintah, serta untuk memberikan rekomendasi tentang bagaimana sistem tersebut bisa diperbaiki agar lebih efektif dalam mendukung pengelolaan anggaran yang efisien dan akuntabel.

Beban kerja pegawai juga memegang peranan penting dalam kinerja instansi pemerintah, terutama dalam kaitannya dengan pengelolaan program dan pelayanan publik (Ikhwan et al., 2023). Beban kerja yang terlalu tinggi, terutama jika tidak dikelola dengan baik, dapat menurunkan produktivitas pegawai, meningkatkan tingkat stres, dan akhirnya memengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Setiap pegawai pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu dalam pelaksanaan program-program yang ada, dan ketika

kualitas pekerjaan yang mereka ciptakan dapat menurun jika beban kerja mereka tidak seimbang.

Menurut (Fahrepi, 2020) beban kerja yang berlebihan dapat menyebabkan kelelahan mental dan fisik, serta menurunkan kualitas hasil kerja. Pegawai yang mengalami stres dan kelelahan tidak akan dapat bekerja dengan efektif, dan ini bisa berdampak pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengelola beban kerja pegawai secara optimal, dengan mempertimbangkan kapasitas dan keahlian masing-masing pegawai. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pengelolaan beban kerja pegawai di Surabaya berpengaruh terhadap kinerja mereka dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada, serta bagaimana hal ini memengaruhi pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Penelitian mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian internal, dan beban kerja terhadap kinerja instansi pemerintah sangat relevan dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah. Pemerintah daerah di Surabaya, memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola anggaran publik dengan baik dan transparan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi pemerintah dalam memperbaiki dalam merencanakan dan mengelola anggaran, serta dalam menciptakan sistem pengendalian internal yang lebih efektif.

Melalui identifikasi hubungan dan pengaruh antara faktor-faktor tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi praktis bagi Pemkot Surabaya

dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, memperbaiki sistem pengendalian internal, serta mengoptimalkan beban kerja pegawai. Hal ini tentu akan berkontribusi pada peningkatan kinerja instansi pemerintah dan keberhasilan program-program yang dijalankan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Surabaya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat di rumuskan beberapa masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini :

1. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya?
3. Apakah Beban Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan berikut dirumuskan berdasarkan identifikasi permasalahan sebelumnya dan akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini:

1. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Instansi pada Pemerintah Kota Surabaya.
2. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Instansi pada Pemerintah Kota Surabaya.

3. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh Beban Kerja terhadap Kinerja Instansi pada Pemerintah Kota Surabaya

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini memberikan data dan wawasan yang relevan bagi instansi pemerintah, khususnya dalam hal bagaimana kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian internal, dan beban kerja pegawai memengaruhi kinerja instansi. Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan pengelolaan anggaran dan sistem pengendalian internal, serta mengoptimalkan beban kerja pegawai agar dapat mencapai kinerja yang lebih efisien. Oleh karena itu, studi ini berpotensi menjadi referensi yang berguna bagi para pembuat kebijakan di masa mendatang dalam merumuskan regulasi yang lebih transparan dan efektif.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini turut memperkaya khasanah ilmu, khususnya di bidang administrasi public dan akuntansi keuangan sektor public. Memberikan tambahan wawasan terhadap literatur yang sudah ada mengenai keterkaitan antara kejelasan sasaran anggaran, pengendalian internal, beban kerja dan kinerja instansi pemerintah. Diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini akan menjadi acuan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, serta memperkaya wawasan akademik mahasiswa dan pengajar di universitas.

3. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, para peneliti dapat memperdalam dan memperluas pemahaman yang telah diperoleh selama masa perkuliahan, khususnya dalam bidang akuntansi, manajemen keuangan, dan administrasi publik. Penelitian ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan peneliti dalam melakukan analisis data, menguji hipotesis, serta memahami dinamika yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, Penelitian ini menjadi bagian dari tugas akhir untuk program sarjana (S-1) di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, khususnya dalam lingkup Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

4. Bagi Pembaca

Penelitian ini memberikan wawasan dan pengetahuan baru bagi pembaca mengenai pentingnya kejelasan sasaran anggaran, pengendalian internal, serta pengelolaan beban kerja pegawai dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat membantu pembaca, baik akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum, untuk lebih memahami faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pemerintah dan bagaimana hal tersebut dapat ditingkatkan untuk mendukung penyelenggaraan layanan publik yang lebih optimal.